

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau

By :
Andi Wijaya
Toti Indrawati
Eka Armas Pailis

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: andiwijaya_liang@yahoo.com

Analysis of affecting labor absorption factors in Riau Province

ABSTRACT

This research was conducted in Riau Province, aims to look at the influence of foreign investment, economic growth, the provincial minimum wage, and the average length of the school either simultaneously or partially to labor absorption in Riau province. Economic growth is always directed to improve the lives and well-being of society. Expansion of labor absorption needed to keep pace with the growth of young people who enter the labor market. The imbalance between labor force growth and job creation will lead to high unemployment.

This research uses secondary data types. The method of analysis used in this research is descriptive quantitative method, as a simultaneously and partially analysis (multiple linear regression analysis using SPSS version 18.0).

The results of the testing that has been done, simultaneous regression (F test) showed that all the independent variables have a significant effect on the dependent variable. The results of the partial regression test (t test) showed that only variable Average Length of School who have a significant effect on labor absorption in Riau province. While the variable Foreign Investment, Economic Growth and Provincial Minimum Wage has no significant effect on labor absorption in Riau province. The magnitude of the effect caused by the four independent variables together on the dependent variable was 82,9%, while the remaining 17,1% is influenced by other variables not examined in this research.

Keywords : *Foreign Investment, Economic Growth, The Provincial Minimum Wage, Average Length of The School, and Labor Absorption*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin secara merata di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk

mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga ditujukan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Pembangunan adalah upaya multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk di dalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja (Widodo, 2006:4). Pembangunan yang dilakukan tidak hanya ditingkat pusat tetapi pembangunan dapat dilakukan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Pembangunan yang dilakukan di wilayah yang lebih kecil akan memberikan hasil yang mampu mendukung pembangunan yang dilakukan di wilayah yang lebih besar.

Sumber daya manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha keras atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Pengertian kedua dari sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut (Simanjuntak dalam Arfida, 2003:19).

Peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi pertambahan jumlah angkatan kerja. Pertambahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan penyerapan tenaga kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Penduduk

merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan unsur untuk membangun suatu perekonomian. Tingkat perkembangan penduduk mutlak harus diketahui sebagai pedoman dalam perencanaan dan sebagai evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan pembangunan suatu negara atau daerah. Berikut akan ditampilkan data jumlah penduduk Provinsi Riau dan perkembangannya dari tahun 2008-2012.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Provinsi Riau dan Perkembangannya Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertambahan Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2008	5.189.154	204.850	4,1
2009	5.306.533	117.379	2,2
2010	5.538.367	231.834	4,3
2011	5.738.543	200.176	3,6
2012	5.929.172	190.629	3,3

Sumber: BPS Provinsi Riau, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia Tahun 2008-2012

Jumlah penduduk Provinsi Riau dari tahun 2008-2012 terus mengalami peningkatan yakni pada tahun 2008 sebesar 5.189.154 jiwa dan tahun 2012 mencapai 5.929.172 jiwa. Walaupun jumlah penduduk Provinsi Riau dari tahun ke tahun meningkat tetapi pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 pertumbuhannya mencapai 4,1%, tahun 2009 turun menjadi 2,2%, tahun 2010 kembali meningkat menjadi 4,3%, tahun 2011 turun menjadi 3,6% dan tahun 2012 mencapai 3,3%. Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Riau antara lain disebabkan oleh tingginya angka kelahiran maupun migrasi masuk.

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana

mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Dengan *skill* dan kemampuan yang dimiliki, diharapkan nantinya penduduk usia muda akan terserap dalam pasar tenaga kerja. Namun seiring berkembangnya zaman dan memasuki era perdagangan bebas ternyata apa yang diharapkan tidaklah sesuai dengan kenyataannya. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam hal ini *supply* lebih besar daripada *demand* tentunya menimbulkan masalah pengangguran. Fenomena ini menjadi menarik untuk dibahas dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Secara teoritis, masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesempatan kerja dapat diatasi dengan memaksimalkan investasi yang produktif di berbagai sektor ekonomi. Penanaman modal merupakan suatu langkah awal yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan produksi. Investasi atau yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ditinjau dari sumber daya yang dimiliki, Provinsi Riau mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk aktifitas penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) karena tersedianya berbagai bahan mentah dari berbagai sektor seperti sektor pertanian dan perkebunan sehingga jika potensi daerah ini diberdayakan maka sangat besar manfaatnya dalam menghasilkan devisa negara dan juga menunjang terciptanya kegiatan ekonomi di sekitar daerah tersebut yang dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau, nilai realisasi investasi PMA pada tahun 2012 merupakan pencapaian tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Pada tahun 2009 realisasi PMA sebesar Rp 2.365 milyar, pada tahun 2010 turun menjadi Rp 778 milyar. Kemudian, pada tahun 2011 realisasi PMA mulai meningkat menjadi Rp 1.925 milyar dan pada tahun 2012 mencapai Rp 10.836 milyar. Kenaikan dan penurunan nilai investasi PMA di Provinsi Riau antara lain disebabkan oleh ketersediaan energi dan infrastruktur yang belum memadai, serta permasalahan perizinan dan panjangnya birokrasi yang ada di Provinsi Riau.

Pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Dengan pembangunan ekonomi diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga kegiatan perekonomian akan menjadi lebih luas dan selanjutnya dapat memperkecil jumlah orang yang menganggur. (Mulyadi, 2008:56).

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau tahun 2008 mencapai 8,0%, tahun 2009 mengalami penurunan yaitu 6,5%, tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 7,1%, tahun 2011 dan 2012 secara berturut-turut pertumbuhan ekonomi Riau meningkat mencapai 7,7% dan 7,8%. Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi yang agak melambat dari tahun sebelumnya disebabkan oleh dampak adanya krisis keuangan global yang melanda dunia. Kondisi yang ideal dari pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan tenaga kerja adalah ketika pertumbuhan ekonomi

mampu mempengaruhi pertumbuhan tenaga kerja secara lebih besar.

Upah merupakan salah satu faktor krusial dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan upah berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Peningkatan upah dapat menjadi indikator bagi sektor-sektor ekonomi dalam melakukan permintaan terhadap tenaga kerja.

Secara umum, tingkat upah selalu mengalami kenaikan karena naiknya harga barang-barang dan jasa yang mengakibatkan biaya hidup menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2009 upah minimum Provinsi Riau sebesar Rp 901.600,00. Tahun 2010 dan 2011 upah minimum Provinsi Riau berturut-turut sebesar Rp 1.016.000,00 dan Rp 1.120.000,00 serta tahun 2012 meningkat menjadi Rp 1.238.000,00.

Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena, pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang modern.

Lama waktu tempuh pendidikan bagi seseorang akan mempengaruhi kualitas SDM tersebut. Berdasarkan data dalam Indeks Pembangunan Manusia, rata-rata lama sekolah di Provinsi Riau tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 secara berturut-turut adalah 8,56 tahun, 8,58 tahun, 8,63 tahun, dan 8,64 tahun. Ini berarti secara rata-rata tingkat pendidikan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas setara dengan kelas dua sekolah tingkat menengah pertama.

Bertitik tolak dari penjelasan latar belakang di atas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam penelitian ini dengan judul: “Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Riau”.

Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka masalah yang dapat penulis rumuskan dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh investasi PMA, pertumbuhan ekonomi, upah, dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh investasi PMA, pertumbuhan ekonomi, upah, dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis/akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan kependidikan, khususnya mengenai gambaran penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau. Dan membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan strategi menyangkut perluasan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:
 - a. Bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan.
 - b. Sebagai perbandingan atau referensi bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang dan segala pemanfaatan dari tulisan ini.

TELAAH PUSTAKA

Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

Mantra (2003:224) mengatakan istilah tenaga kerja tidaklah identik dengan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan tenaga kerja (*manpower*) ialah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Sedangkan menurut Syahza (2009:52) tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

ILO (*International Labor Organization*) akhirnya memutuskan bahwa seseorang dapat maupun belum dapat dilibatkan dalam kegiatan ekonomi didasarkan pada umur. Dan batasan umur ini diserahkan kepada setiap negara dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengambil penduduk umur 10 tahun ke atas sebagai kelompok penduduk usia kerja. Akan tetapi sejak tahun 1998 mulai menggunakan usia 15 tahun ke atas, atau lebih tua batas usia kerja pada periode sebelumnya.

Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja, dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali tetapi aktif mencari pekerjaan. Mereka yang berumur 15 tahun atau tidak mencari pekerjaan karena sekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau secara fisik dan mental tidak memungkinkan untuk bekerja tidak termasuk angkatan kerja. (Mantra, 2003:225).

Konsep Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa sangat bergantung pada daya beli masyarakat dan kemungkinan ekspor. Sebaliknya, produksi dalam negeri dapat bersaing oleh barang-barang impor.

Sumarsono (2003:70) mengatakan sifat permintaan tenaga kerja adalah *derived demand*, yang artinya bahwa permintaan tenaga kerja oleh perusahaan sangat tergantung permintaan masyarakat terhadap hasil produksinya. Sehingga untuk mempertahankan tenaga kerja yang digunakan perusahaan, maka harus dijaga bahwa permintaan masyarakat terhadap produk perusahaan harus tetap stabil dan kalau mungkin meningkat. Untuk menjaga stabilitas permintaan produk perusahaan serta kemungkinan pelaksanaan ekspor, maka perusahaan harus memiliki kemampuan bersaing baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian bisa diharapkan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja bisa dipertahankan atau bahkan ditinggalkan.

Pasar Kerja

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang ketenagakerjaan adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*), pada suatu tingkat upah. (Kusumosuwidho dalam Subri, 2008:56). Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa:

- Lebih besarnya penawaran dibanding permintaan tenaga kerja (adanya *excess supply of labor*).
- Lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya *excess demand of labor*).

Menurut Teori Lewis, kelebihan penawaran tenaga kerja

dalam suatu perekonomian bukan merupakan suatu masalah. Kelebihan tenaga kerja di suatu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan tenaga kerja di sektor lain (Subri, 2008:59).

Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor yang menghasilkan barang atau jasa yang relatif besar (Simanjuntak, 2001:82).

Menurut Kuncoro (2002:45) penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

Menurut Handoko (dalam Ridha, 2011:10) penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan pengeluaran non upah.

Investasi

Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal dan perlengkapan produksi untuk menambah

kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Ada kalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang telah haus dan perlu didepresiasi (Sukirno, 2006:121).

Deliarnov (2005:182) menggolongkan investasi berdasarkan sumbernya menjadi dua yaitu: investasi yang bersumber dari dalam negeri (PMDN) dimana sumber ini berasal dari tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah, dan tabungan paksa serta investasi yang bersumber dari luar negeri (PMA) dimana sumber ini dapat berupa bantuan luar negeri dan penanaman modal asing.

Investasi yang mampu mendorong pertumbuhan tidak hanya berasal dari tabungan domestik. Investasi dari luar negeri juga dapat mempengaruhi GDP dan GNP dengan cara yang berbeda. Investasi asing merupakan salah satu cara yang bisa dimanfaatkan oleh sebuah negara untuk tumbuh dan sekaligus mempelajari teknologi terkini yang telah dikembangkan dan digunakan di negara-negara kaya (Mankiw, 2003:67).

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono dalam Kuncoro (2004:129), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Di sini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Pertumbuhan sebagai proses, berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi

berkaitan dengan output per kapita, berarti harus memperhatikan dua hal, yaitu output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Aspek jangka panjang, mengandung arti bahwa kenaikan output per kapita harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama (10, 20, atau 50 tahun, bahkan bisa lebih lama lagi). Kenaikan output per kapita dalam satu atau dua tahun kemudian diikuti penurunan *bukan* pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atas suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Mankiw, 2003:15).

Upah

Menurut Sumarsono (2003:105) upah diartikan sebagai sejumlah dana yang dikeluarkan pengusaha untuk membayar tenaga kerja karena telah melakukan pekerjaannya yaitu menghasilkan produk. Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun

2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Menurut Sumarsono perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan.

Pendidikan

Peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian semua pihak dalam memasuki era milenium ini. Terlebih dalam suasana krisis multidimensi, masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi persaingan bebas. Upaya peningkatan kualitas pendidikan mutlak merupakan suatu keharusan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan pada hakekatnya merupakan proses investasi pengembangan mutu sumber daya manusia dalam bentuk “manusia terdidik” (Sumarsono, 2009:98).

Agar tidak tertinggal dengan masyarakat dan bangsa di dunia, maka peningkatan pendidikan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan potensi dasar yang dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan akan memiliki makna bagi perbaikan kualitas Indonesia secara keseluruhan (Sumarsono, 2009:98).

Indikator kualitas SDM dapat berupa tingkat pendidikan dan tingkat penduduknya. Dengan demikian negara berkembang seperti Indonesia

untuk memacu pertumbuhan ekonomi memerlukan SDM berkualitas. Namun tingginya kualitas itu tidak dapat diukur dengan angka-angka semata, melainkan diukur dengan apa yang dihasilkan (Sumarsono, 2003:58).

Besarnya pengeluaran pemerintah dan masyarakat terhadap bidang pendidikan dan kesehatan menjadi ukuran yang menunjukkan perhatian pada usaha pengembangan kualitas SDM. Investasi SDM yang dilakukan oleh negara-negara maju sangat menentukan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi riil. Pendidikan adalah faktor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan karir seseorang (Sumarsono, 2009:98).

Penelitian Terdahulu

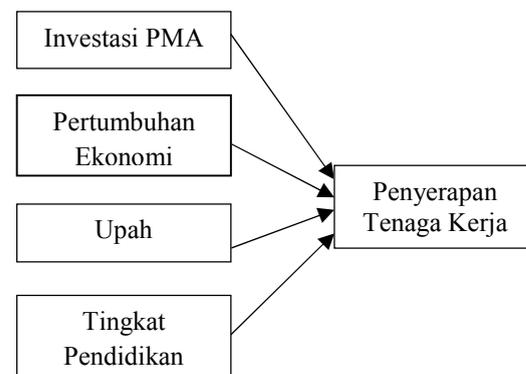
Penelitian yang dilakukan oleh Dimas dan Woyanti (2009) mengenai "Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta", dengan menggunakan variabel independennya adalah PDRB, nilai upah, serta nilai investasi, dan variabel dependennya adalah penyerapan tenaga kerja. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa PDRB berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif dengan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan nilai upah dan nilai investasi berpengaruh signifikan serta memiliki hubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta.

Menurut penelitian Kadafi (2013) dengan judul "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Konveksi Kota Malang", dengan menggunakan variabel independennya yaitu variabel modal, volume penjualan, tingkat pendidikan, dan upah. Serta variabel dependennya yaitu penyerapan tenaga kerja. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel tingkat pendidikan dan upah memiliki

pengaruh yang positif. Sedangkan secara simultan variabel modal, volume penjualan, tingkat pendidikan, dan upah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Investasi PMA, Pertumbuhan Ekonomi, Upah, dan Tingkat Pendidikan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau. Berikut kerangka pemikiran penelitian:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori, maka hipotesis dari penelitian ini adalah: investasi PMA, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau sedangkan upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Riau dengan menggunakan data periode 2003-2012. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah penduduk Provinsi Riau yang bekerja (BPS), data investasi PMA Provinsi Riau (BPMPD), nilai PDRB Provinsi Riau tanpa migas atas dasar harga konstan 2000 (BPS), data upah minimum Provinsi Riau (BPS), data rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Riau (BPS), serta data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis mendatangi langsung instansi-instansi yang berkaitan dengan objek penelitian. Instansi-instansi tersebut yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Riau serta Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau. Kemudian penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, serta referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam melakukan analisis data digunakan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan permasalahan secara umum dengan membahas data yang ada dan dikaitkan dengan keadaan sebenarnya. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang menggunakan model regresi linier berganda dengan fungsi sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Dari bentuk fungsi regresi diatas kemudian dibentuk ke dalam fungsi regresi linier berganda yang bentuk perkembangannya sebagai berikut (Suharyadi, 2011:210):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

Keterangan :

Y = Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)

β_0 = Intercept

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

X_1 = Investasi PMA (Milliar Rp)

X_2 = Pertumbuhan Ekonomi (%)

X_3 = Upah (Rp)

X_4 = Tingkat Pendidikan (Tahun)

μ = *Disturbance Error* atau kesalahan pengganggu pada persamaan linier

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji F (F-test)

Uji F ini dilakukan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}(\alpha; k - 1; n - k)$ maka, H_0 diterima
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}(\alpha; k - 1; n - k)$ maka, H_0 ditolak

Tabel 2. Hasil Analisis of Variance (ANOVA) Pengaruh Investasi PMA, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau Tahun 2003-2012

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.292	4	.075	6.074	.037 ^a
Residual	.062	5	.012		
Total	.360	9			

Dengan demikian F_{hitung} (6,074) > F_{tabel} (5.19) dan tingkat probabilitas (0,037) < (0,05) sehingga dinyatakan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada taraf *level of significant* 95% secara bersama-sama seluruh variabel independen Investasi PMA, Pertumbuhan Ekonomi, Upah

Minimum Provinsi, dan Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau selama periode 2003-2012.

Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Koefisien determinasi berganda (R^2) berguna untuk mengukur besar ketepatan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang baik adalah yang semakin mendekati 1, berarti kesalahan dalam model yang digunakan semakin kecil. Pengujian dilakukan untuk mengukur hubungan dari masing-masing variabel dimana nilai R^2 terletak pada garis regresi antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$).

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai R^2 sebesar 0,829. Hal ini berarti 82,9% Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau pada tahun 2003-2012 dipengaruhi oleh Investasi PMA, Pertumbuhan Ekonomi, Upah

Minimum Provinsi, dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan 17,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Uji t (t-test)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Bila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ berarti hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.
- Bila $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$ berarti hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.
- Bila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ berarti hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.
- Bila $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ berarti hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda Pengaruh Investasi PMA, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau Tahun 2003-2012

Variabel	Koefisien	Std. Error	T_{hitung}	Sig.
X1	-0,017	0,015	-1,155	0,300
X2	0,205	0,092	2,223	0,077
X3	0,235	0,223	1,049	0,342
X4	1,207	0,340	3,552	0,016

$R = 0,911$
 $R^2 = 0,829$
 $C = 9,819$
 Nilai $F_{hitung} = 6,074$
 Nilai $F_{tabel} (\alpha = 5\%) = 5,19$
 Nilai $t_{tabel} (\alpha = 5\%) = 2,57058$

Nilai t tabel dengan taraf signifikan 95% dengan persamaan berikut:

1. Investasi PMA (X_1). Diketahui - $t_{hitung} (-1,155) > -t_{tabel} (-2,570)$

sehingga dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Selain menggunakan t_{hitung} dan t_{tabel} , dalam menguji hipotesis dapat

dilakukan melalui perbandingan Sig pada hasil SPSS dengan α . Sig (0,300) > α (0,05) sehingga H_0 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada taraf *level of significant* 95% investasi PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.

2. Pertumbuhan Ekonomi (X_2). Diketahui t_{hitung} (2,223) < t_{tabel} (2,570) sehingga dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Selain menggunakan t_{hitung} dan t_{tabel} , dalam menguji hipotesis dapat dilakukan melalui perbandingan Sig pada hasil SPSS dengan α . Sig (0,077) > α (0,05) sehingga H_0 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada taraf *level of significant* 95% pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.
3. Upah Minimum Provinsi (UMP) (X_3). Diketahui t_{hitung} (1,049) < t_{tabel} (2,570) sehingga dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Selain menggunakan t_{hitung} dan t_{tabel} , dalam menguji hipotesis dapat dilakukan melalui perbandingan Sig pada hasil SPSS dengan α . Sig (0,342) > α (0,05) sehingga H_0 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada taraf *level of significant* 95% upah minimum provinsi (UMP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.
4. Rata-rata Lama Sekolah (X_4). Diketahui t_{hitung} (3,552) > t_{tabel} (2,570) sehingga dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Selain menggunakan t_{hitung} dan t_{tabel} , dalam menguji hipotesis dapat dilakukan melalui

perbandingan Sig pada hasil SPSS dengan α . Sig (0,016) < (0,05) sehingga H_a diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada taraf *level of significant* 95% rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.

Koefisien Korelasi (r)

Koefisien korelasi (r) berguna untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien korelasi maka semakin erat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen atau sebaliknya. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 3. diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,911 mendekati 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Investasi PMA, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau tahun 2003-2012.

Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 3. diperoleh persamaan berikut:

$$\hat{Y} = 9,819 - 0,017 X_1 + 0,205 X_2 + 0,235 X_3 + 1,207 X_4$$

Persamaan tersebut merupakan hasil perhitungan melalui uji F, koefisien determinasi berganda, uji t, dan koefisien korelasi. Maka hasil koefisien regresinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (β_0) = 9,819, nilai ini berarti jika semua variabel independen Investasi PMA, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Rata-rata Lama Sekolah dianggap konstan

- atau tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*) maka jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Riau adalah 9.819 jiwa.
- b. Nilai koefisien (β_1) = -0,017. Berdasarkan nilai koefisien dan hasil t_{hitung} diketahui bahwa Investasi PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau tahun 2003-2012. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa investasi dalam berbagai bentuknya akan memberikan banyak pengaruh pada perekonomian suatu daerah dan akan menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja. Ketidaksesuaian antara kenyataan dan teori ini jika diteliti lebih lanjut memberikan gambaran bahwa investasi yang terjadi lebih kepada investasi yang bersifat padat modal daripada padat karya.
- c. Nilai koefisien (β_2) = 0,205. Berdasarkan nilai koefisien dan hasil t_{hitung} diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau tahun 2003-2012. Hal ini jika kita kaji lebih mendalam dan dihubungkan dengan investasi yang lebih bersifat kapital tanpa dibarengi dengan penambahan lapangan kerja akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.
- d. Nilai koefisien (β_3) = 0,235. Berdasarkan nilai koefisien dan hasil t_{hitung} diketahui bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau tahun 2003-2012. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa tingkat upah memiliki hubungan yang negatif atau berbanding terbalik dengan penyerapan tenaga kerja. Sumarsono (2009:201) menyatakan beberapa ekonom melihat bahwa penetapan upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja. Kelompok ekonom lainnya dengan bukti empirik menunjukkan bahwa penerapan upah minimum tidak selalu identik dengan pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi. Secara teoritis, perusahaan akan membayar upah tenaga kerja sesuai dengan produktivitasnya, artinya tenaga kerja yang produktivitasnya rendah akan menerima upah yang rendah dan sebaliknya.
- e. Nilai koefisien (β_4) = 1,207. Berdasarkan nilai koefisien dan hasil t_{hitung} diketahui bahwa rata-rata lama sekolah berhubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau tahun 2003-2012. Dengan asumsi variabel lain tetap, jika rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 1 tahun maka penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau akan bertambah sebesar 1.207 jiwa. Nilai rata-rata lama sekolah berpengaruh pada kemampuan penduduk untuk meningkatkan peluang bekerja dan keterampilan mendapatkan penghasilan lebih.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis serta pembahasan penelitian dengan menggunakan periode tahun 2003-2012, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan variabel independen yang terdiri dari Investasi PMA, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau tahun 2003-2012.
2. Variabel Investasi PMA tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau tahun 2003-2012. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diharapkan bahwa Investasi PMA berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau tahun 2003-2012. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan positif dan UMP berhubungan negatif serta berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
4. Variabel Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau tahun 2003-2012.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan peran serta seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha untuk dapat menciptakan iklim lingkungan politik dan keamanan yang kondusif bagi investasi di Provinsi Riau, memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana infrastruktur yang belum memadai, serta mempermudah birokrasi sehingga dapat menyerap lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan penciptaan kesempatan kerja.
2. Pertumbuhan ekonomi hendaknya diarahkan untuk dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Dengan diketahuinya sektor-sektor yang berpotensi dalam menyerap tenaga kerja, maka pemerintah diharapkan lebih memprioritaskan sektor-sektor yang dominan tanpa mengacuhkan sektor-sektor di luar dominan misalnya melalui program-program pelatihan kerja sesuai dengan minat bakat. Sehingga dapat mendorong penciptaan dan perluasan kesempatan kerja pada sektor lainnya serta menunjang perekonomian Provinsi Riau.
3. Faktor pendidikan dan keterampilan hendaknya menjadi suatu prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan ekonomi Provinsi Riau karena tingkat pendidikan sangat menentukan bagi setiap pencari kerja dalam memasuki pasar kerja. Untuk itu diperlukan fasilitas pendidikan formal yang

lebih merata di setiap daerah di Provinsi Riau, khususnya pendidikan formal kejuruan. Pendidikan formal kejuruan dapat menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai sehingga memudahkan dalam penyaluran dan penempatan pada berbagai bidang pekerjaan. Perlunya komitmen dan kesadaran semua pihak akan pentingnya pendidikan agar dalam jangka panjang terwujud sumber daya manusia yang berkualitas. Yang pada akhirnya SDM berkualitas tersebut akan dapat menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang bermutu serta memajukan perekonomian di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfida. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah. 2010-2012. *Statistik Investasi Provinsi Riau*. Pekanbaru: BPMPD.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Indeks Pembangunan Manusia*. Pekanbaru: BPS.
- _____. 2003-2012. *Keadaan Angkatan Kerja Indonesia*. Pekanbaru: BPS.
- _____. 2003-2012. *Riau Dalam Angka*. Pekanbaru: BPS.
- _____. 2003-2012. *Statistik Indonesia*. Pekanbaru: BPS.
- Deliarnov. 2005. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Yogyakarta: Rajawali Pers
- Dimas dan Nenik Woyanti. 2009. *Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta*. Semarang. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol. 16 No.1.
- Kadafi, Muhammad Fuad. 2013. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Konveksi Kota Malang*. Malang. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya.
- Kuncoro, Haryo. 2002. *Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 7 No. 1. Halaman 45-46.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N Grogory. 2003. *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Mantra, Ida Bagoes. 2003. *Demografi Umum Edisi Kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridha, Andi Rahmat. 2011. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Percetakan Skala Kecil-Menengah di Kota Makassar*. Skripsi.
- Simanjuntak, Payaman J. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI.

- Subri, Mulyadi. 2008. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharyadi dan Purwanto. 2011. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo.
- _____. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syahza, Almasdi. 2009. *Ekonomi Pembangunan, Teori dan Kajian Empirik Pembangunan Pedesaan*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid Dua*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.